

### OPTIMALISASI LAPORAN KEUANGAN DAN PAJAK SEBAGAI STRATEGI BISNIS DALAM MENGAKSES TAMBAHAN MODAL DI ERA DIGITALISASI PADA UMKM KELURAHAN PANINGGILAN, CILEDUG

Ahmad Rofiudin<sup>1</sup>, Fajar Ramadhan<sup>2</sup>, Mariam<sup>3</sup>, Siti Chizatun Fitriyah<sup>4</sup>, Dian Widiyati<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

#### Article History

Received : Maret-2025

Revised : Maret -2025

Accepted : April-2025

Published : April -2025

#### Corresponding author\*:

Ahmad Rofiudin

#### Contact:

[rofi.langit@gmail.com](mailto:rofi.langit@gmail.com)

#### Cite This Article:

Rofiudin, A., Ramadhan, F.,  
Mariam, M., Fitriyah, S. C., &  
Widiyati, D. (2025).

OPTIMALISASI LAPORAN  
KEUANGAN DAN PAJAK  
SEBAGAI STRATEGI BISNIS  
DALAM MENGAKSES  
TAMBAHAN MODAL DI ERA  
DIGITALISASI PADA UMKM  
KELURAHAN PANINGGILAN,  
CILEDUG. Jurnal Abdi Masyarakat  
Multidisiplin, 4(01), 06–11.

#### DOI:

<https://doi.org/10.56127/jammu.v4i01.2016>

**Abstract:** *Small and medium-sized enterprises (SMEs) in Paninggilan Village, Ciledug District, still face challenges in accessing additional capital due to suboptimal financial reporting and tax filing practices. This study aims to optimise financial reporting and tax compliance through digitalisation as a business strategy to enhance access to working capital. The implementation methods include needs surveys, socialisation, training, and intensive mentoring for SME operators in preparing digital financial reports and submitting tax reports online. The results show an improvement in SME operators' understanding and ability to manage finances and taxes, which positively impacts tax compliance and the ease of applying for the People's Business Credit (KUR). This programme demonstrates that the digitalisation of financial and tax administration can strengthen business legality and enhance the competitiveness of MSMEs. Optimising financial and tax reporting through digitalisation is an effective strategy to support MSME development and improve community welfare in the digital era.*

**Keywords:** *UMKM, digital financial reporting, tax reporting, additional capital, business digitisation*

**Abstrak:** UMKM di Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, masih menghadapi kendala dalam mengakses tambahan modal yang disebabkan oleh kurang optimalnya pencatatan laporan keuangan dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan laporan keuangan dan perpajakan melalui digitalisasi sebagai strategi bisnis untuk membuka akses modal usaha. Metode pelaksanaan meliputi survei kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan intensif kepada pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan digital dan pelaporan pajak secara online. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan pajak, yang berdampak positif pada kepatuhan pajak dan kemudahan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini membuktikan bahwa digitalisasi administrasi keuangan dan perpajakan dapat memperkuat legalitas usaha dan meningkatkan daya saing UMKM. Optimalisasi laporan keuangan dan pajak melalui digitalisasi menjadi strategi efektif untuk mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era digital.

**Kata Kunci:** UMKM, laporan keuangan digital, pelaporan pajak, tambahan modal, digitalisasi bisnis

#### PENDAHULUAN

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia (Kustanto, 2020; Windusanco, 2020). Terbukti pada krisis ekonomi tahun 1998, ketika banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan, UMKM justru menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Peran UMKM sangat terasa terutama pada tingkat kelurahan seperti di Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Kelurahan Paninggilan yang terletak di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, merupakan salah satu kelurahan di pinggiran kota metropolitan Jakarta. Wilayah ini memiliki 58 rukun tetangga dan 18 rukun warga dengan luas 1,08 km<sup>2</sup> serta jumlah penduduk sekitar 20.665 jiwa, dengan kepadatan 19.134 jiwa per km<sup>2</sup>. UMKM lokal di kelurahan ini berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dengan karakteristik yang fleksibel dan inovatif, UMKM mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat, sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pelaku UMKM di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mengakses tambahan modal. Hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya pencatatan laporan

keuangan dan pajak. Minimnya pemahaman tentang laporan keuangan serta kesulitan dalam proses pencatatan disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan dan pajak. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang mengabaikan pencatatan laporan keuangan, sehingga berdampak negatif pada pelaporan dan kepatuhan perpajakan. Kondisi ini menghambat akses UMKM untuk mendapatkan tambahan modal yang sangat dibutuhkan. Hasil survei awal di Desa Paninggilan, Ciledug, menunjukkan tingkat literasi manajerial pelaku UMKM yang bervariasi. Banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya laporan keuangan dan pajak, serta tidak memiliki catatan transaksi yang jelas. Ketidaktahuan terhadap teknologi membuat mereka tertinggal dan hanya mengandalkan pencatatan manual yang sederhana atas transaksi masuk dan keluar. Mereka jarang melakukan pelaporan pajak. Akibatnya, pelaku UMKM tidak dapat menghitung keuangan secara keseluruhan dan memberikan data transparan kepada pemilik modal atau perbankan yang menjadi sumber investasi, sehingga sulit mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usaha.

Laporan Keuangan adalah ringkasan proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur. Dengan menghasilkan laporan keuangan yang baik, UMKM dapat memenuhi syarat pengajuan kredit pada perbankan. Para pelaku UMKM juga bisa mengetahui posisi keuangan usahanya, melakukan evaluasi kinerja usaha yang dijalankan, serta mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialami. Laporan keuangan sangat penting bagi kreditur sebagai bahan evaluasi dan analisis terhadap tingkat risiko bonafiditas dan likuiditas. Selain laporan keuangan, Pajak juga menjadi salah satu hal penting untuk mempermudah mendapatkan akses penambahan modal.

Pajak UMKM lebih dikenal dengan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (PP 23/2018). PPh UMKM yang berlaku sekarang sebesar 0,5%. Selain itu, ada bentuk keringanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, yaitu batasan peredaran bruto (omzet) yang tidak dikenai PPh sampai dengan Rp500 juta dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022) dengan syarat peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam setahun.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). PMK ini ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Latar belakang penerbitan PMK ini adalah kebutuhan regulasi dalam pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan fleksibel. Reformasi pajak ini melibatkan lima pilar utama, yaitu Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Peraturan Perundang-undangan. Pilar Teknologi Informasi dan Basis Data serta Proses Bisnis ini diatur melalui regulasi yang komprehensif agar data terdigitalisasi dan terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah mengakses penambahan modal.

Modal Usaha adalah salah satu faktor kunci penentu keberhasilan bisnis. Tanpa modal yang cukup, pelaku UMKM sulit memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pemasaran. Modal juga diperlukan untuk investasi pengembangan usaha guna memperluas jangkauan pasar atau kapasitas produksi. Namun, banyak pelaku UMKM merasa kesulitan mendapatkan akses pembiayaan karena berbagai faktor, termasuk minimnya pengetahuan mengenai produk pinjaman, persyaratan yang rumit, dan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM memahami cara memperoleh pinjaman modal yang tepat, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh perbankan. Menurut Humas Kementerian UMKM (24 Februari 2025), Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa program KUR bukan sekadar formalitas bagi penyalur, tetapi harus diiringi peningkatan kualitas distribusi. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan 60% dialokasikan untuk sektor produksi, menargetkan 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi. KUR sendiri merupakan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya UMKM, dari sisi perkuatan modal. Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi UMKM. Melalui siaran pers Kemenko Bidang Perekonomian nomor HM.4.6/196/SET.M.EKON.3/07/2021, pemerintah mendukung UMKM Go Digital sebagai akselerasi digitalisasi UMKM untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. Digitalisasi dapat membantu efisiensi biaya dan memperluas pasar sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat dengan judul *Optimalisasi Laporan Keuangan dan Pajak sebagai Strategi Bisnis dalam Mengakses Tambahan Modal di Era Digitalisasi pada UMKM Kelurahan Paninggilan, Ciledug* dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar dapat memberikan dampak maksimal bagi pelaku UMKM. Tahapan pertama adalah melakukan survei lapangan dan identifikasi kebutuhan UMKM yang meliputi pencatatan laporan keuangan, pelaporan pajak, serta kendala dalam mengakses modal usaha. Survei ini dilaksanakan melalui wawancara dan observasi langsung sehingga tim dapat mengumpulkan data yang komprehensif sebagai dasar penyusunan materi pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Modul pelatihan disusun secara mudah dipahami, memperhatikan latar belakang pendidikan pelaku UMKM yang beragam, serta memuat materi penting mengenai pembuatan laporan keuangan berbasis digital, pemanfaatan fasilitas perpajakan pemerintah, dan prosedur pengajuan tambahan modal usaha.

Setelah tahap persiapan selesai, dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku UMKM. Dalam kegiatan sosialisasi, tim menjelaskan pentingnya pembuatan laporan keuangan yang terstruktur dan pelaporan pajak sebagai salah satu strategi bisnis untuk membuka akses tambahan modal. Pemaparan materi meliputi pengenalan jenis laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku untuk UMKM, pemanfaatan fasilitas pajak sebesar 0,5% yang diberikan pemerintah, serta penjelasan mengenai prosedur pengajuan modal usaha dan manfaatnya dalam mengembangkan bisnis. Selanjutnya, pelatihan dilakukan secara praktis dengan memberikan pemahaman dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi digital yang telah disiapkan. Selain itu, pelatihan pelaporan perpajakan menggunakan sistem E-billing dan aplikasi DJP Online juga diberikan agar pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal. Pelatihan ini juga mencakup pembekalan cara pengajuan kredit atau penambahan modal usaha melalui lembaga keuangan, khususnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM.

Setelah pelatihan, tim memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM untuk memastikan bahwa ilmu yang telah didapat dapat diaplikasikan dengan baik dalam operasional sehari-hari. Pendampingan dilakukan secara intensif berupa bantuan teknis dalam pembuatan dan pencatatan laporan keuangan digital, pendampingan dalam pelaporan pajak sesuai dengan fasilitas perpajakan yang tersedia, serta bimbingan dalam proses pengajuan modal usaha yang melibatkan koordinasi dengan pihak perbankan. Pendampingan ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan pelaku UMKM agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan pajak usahanya serta mempermudah akses ke modal usaha.

Untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program, tim melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Evaluasi dilakukan segera setelah pelatihan melalui kuesioner dan wawancara untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Selain itu, monitoring dilaksanakan setiap tiga bulan untuk memantau perkembangan penerapan laporan keuangan dan pelaporan pajak serta kemajuan dalam mengakses tambahan modal. Monitoring ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dan memberikan solusi agar program dapat berjalan dengan optimal. Evaluasi dan monitoring yang konsisten juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program.

Tahap terakhir adalah dokumentasi dan publikasi seluruh rangkaian kegiatan, hasil, serta dampak dari program pengabdian masyarakat ini. Dokumentasi dilakukan secara sistematis agar hasil program dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi untuk pengembangan kegiatan serupa di masa depan. Publikasi juga diharapkan dapat memperluas manfaat program serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat luas dalam upaya optimalisasi laporan keuangan dan pajak bagi UMKM. Dengan metode pelaksanaan yang terencana dan berkelanjutan ini, diharapkan UMKM di Kelurahan Paninggilan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan secara digital, sehingga mampu membuka akses tambahan modal yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dengan judul *Optimalisasi Laporan Keuangan dan Pajak sebagai Strategi Bisnis dalam Mengakses Tambahan Modal di Era Digitalisasi pada UMKM Kelurahan Paninggilan, Ciledug* menunjukkan hasil yang positif dan memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Hasil survei awal mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya laporan keuangan dan pelaporan pajak.

Banyak dari mereka yang masih menggunakan metode pencatatan manual dan belum memanfaatkan teknologi digital dalam pencatatan usaha. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam pengajuan tambahan modal ke lembaga keuangan karena data keuangan yang tidak lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan intensif mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis digital dan pelaporan perpajakan sesuai regulasi terbaru, terjadi peningkatan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola administrasi keuangan usahanya. Peserta pelatihan mampu memahami jenis-jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi UMKM serta mulai mengimplementasikan penggunaan aplikasi digital sederhana yang memudahkan pencatatan transaksi secara terstruktur dan akurat. Hal ini selaras dengan temuan Alkadim et al. (2024) bahwa pelatihan dan pendampingan yang tepat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM secara signifikan.

Di sisi perpajakan, pemahaman tentang fasilitas Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% dan tata cara pelaporan menggunakan aplikasi DJP Online memberikan kemudahan dan motivasi bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kegiatan ini mendorong kepatuhan pajak yang sebelumnya rendah menjadi lebih baik, sehingga memperkuat legalitas usaha dan mempermudah proses pengajuan pinjaman modal di perbankan. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 dan PMK No. 81 Tahun 2024 yang menekankan digitalisasi perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas UMKM.

Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan juga berperan penting dalam mengatasi kendala teknis dan meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengelola laporan keuangan dan pelaporan pajak. Dalam proses pengajuan tambahan modal, pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan kini mampu menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan terstruktur. Beberapa pelaku UMKM yang mengikuti program ini berhasil mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber tambahan modal dengan persyaratan administrasi yang lebih mudah terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri UMKM (2025) bahwa program KUR bertujuan memperkuat modal pelaku usaha mikro dan kecil sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, dukungan pemerintah dalam mendorong digitalisasi UMKM memberikan peluang yang besar bagi pengembangan usaha di tingkat kelurahan. Digitalisasi tidak hanya mempermudah pencatatan dan pelaporan, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas serta efisiensi biaya usaha. Pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital memiliki daya saing yang lebih baik dan peluang untuk berkembang lebih cepat.

Dari hasil evaluasi dan monitoring selama tiga bulan pasca-pelatihan, terdapat peningkatan signifikan dalam pencatatan laporan keuangan yang teratur dan pelaporan pajak yang tepat waktu. Hal ini memberikan gambaran bahwa metode pelaksanaan yang dirancang dengan baik dan pendampingan yang konsisten efektif dalam mendorong perubahan perilaku pengelolaan usaha di kalangan pelaku UMKM. Kendala yang masih dihadapi umumnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan penyesuaian terhadap teknologi baru, namun dengan dukungan berkelanjutan, diharapkan masalah tersebut dapat diatasi. Program ini membuktikan bahwa optimalisasi laporan keuangan dan pelaporan pajak melalui digitalisasi dapat menjadi strategi bisnis yang efektif untuk meningkatkan akses tambahan modal bagi UMKM di Kelurahan Paninggilan. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan kepatuhan pajak yang meningkat, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

## KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat dengan judul *Optimalisasi Laporan Keuangan dan Pajak sebagai Strategi Bisnis dalam Mengakses Tambahan Modal di Era Digitalisasi pada UMKM Kelurahan Paninggilan, Ciledug* berhasil memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Sebelum pelaksanaan program, banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya laporan keuangan dan pelaporan pajak, serta masih melakukan pencatatan manual yang kurang rapi dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menjadi hambatan utama dalam mengakses tambahan modal dari lembaga keuangan. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, pelaku UMKM mulai mampu membuat laporan keuangan berbasis digital sesuai standar akuntansi UMKM dan melakukan pelaporan pajak dengan benar melalui sistem digital pemerintah.

Pemanfaatan fasilitas perpajakan yang berlaku, seperti tarif PPh final 0,5%, serta pengajuan pinjaman modal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin mempermudah pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usaha. Digitalisasi administrasi keuangan dan perpajakan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memperkuat legalitas dan kredibilitas UMKM di mata lembaga pemberi modal. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan proses perpajakan yang transparan, UMKM di Kelurahan Paninggilan dapat lebih mudah mengakses modal, memperluas usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, optimalisasi laporan keuangan dan pajak melalui digitalisasi merupakan strategi bisnis yang efektif dan perlu terus didorong bagi pengembangan UMKM di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman, M., & Supriyanto, E. (2022). Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 3(2), 120–130.
- [2] Alkadim, M., Noor, Z. Z., Saputra, D. P., Hajar, S., Aziz, S. S., & Keuangan, L. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi UMKM di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. *Community Development Journal*, 5(1), 2306–2314.
- [3] Ahmad, M. I. S., Syamsuardi, S., & Farid, M. (2021). PKM Digitalisasi Bisnis UMKM. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada ...*, 15, 1182–1186. <https://ojs.um.ac.id/semnaslpm/article/view/26318%0Ahttps://ojs.um.ac.id/semnaslpm/article/download/26318/13328>
- [4] Asep Risman, & Mustaffa, M. (2023). Literasi Keuangan Bagi UMKM: Laporan Keuangan untuk Pengembangan Usaha UMKM. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.56174/jap.v4i1.521>
- [5] Ginting, J. P., Prananta, L., & Sasana, W. (2024). Dedikasi pkm. *September 2023*. <https://doi.org/10.32493/dedikaspkm.v4i3>
- [6] Hasil, J., Bersama, K., & Volume, M. (2024). *MENGABDI : Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat Volume. 2, Nomor. 6, Tahun 2024*.
- [7] Haryanti, N. (2024). Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *I(2)*, 122–136.
- [8] Kelurahan, S., & Tahun, P. (2024). *Statistik Kelurahan Paninggilan Tahun 2024*.
- [9] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). *Dukungan Pemerintah untuk Mendorong UMKM Go Digital dan Go Global*. 10 Maret 2025. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3180/dukungan-pemerintah-untuk-mendorong-umkm-go-digital-dan-go-global>
- [10] Kustanto, A. (2022). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. *QISTIE*, 15(1), 17–31.
- [11] Mulyani, N., Agustinus, E., Abdurachman, T. A., & Prawiaryudha, A. L. (2022). Pengelolaan Modal Usaha untuk UMKM Tangsel di Gerai Lengkong "Oleh-Oleh Khas Tangsel." *Dedikasi Pkm*, 3(2), 220. <https://doi.org/10.32493/dedikaspkm.v3i2.20187>
- [12] Negara, T. L., & Kementerian, O. (2024). *Pasal 11 l. 242684*.

- [13] Pemerintah Pusat Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Perintah Pusat Indonesia, 160030, 1–69. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- [14] Septyanto, D., & Hendrani, A. (2017). Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Kecil dan pada pinggiran kota metropolitan Jakarta dan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Kota Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan lingkungan Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. *Abdimas*, 3(2), 59–63.
- [15] Sugianto, Y., Nahriah, S., & Maulana, I. (n.d.). Strategi Manajemen Aset untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Lokal di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- [16] Syaula, M., Amelia, O., & Pramono, C. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Meningkatkan Ekonomi Setelah Pandemi di Desa Kota Pari. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 9–15. <https://doi.org/10.40675/btn.v6i1.3381>
- [17] Widiyanti, P. M., & Jefri, R. (2023). Otomatisasi pencatatan akuntansi sederhana untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (studi kasus eco 21 Purwokerto), 22–33.